

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Organisasi

Kementerian Perhubungan yang sebelum tahun 2010 bernama Departemen Perhubungan memiliki unit kerja kehumasan yang berada dibawah Unit Kerja Eselon II Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Dikarenakan pentingnya organisasi yang menangani kehumasan dikeluarkanlah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2006, dalam BAB XIV dibentuk Pusat Komunikasi Publik yang merupakan unsur penunjang Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang strategis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Sejalan dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik berperan penting dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan pelaksanaan komunikasi dan informasi publik Kementerian Perhubungan.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberian dukungan pelaksanaan komunikasi dan informasi publik serta juru bicara Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan, penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, pelaporan

- program komunikasi publik, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kehumasan, serta dukungan reformasi birokrasi;
2. Penyiapan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian informasi publik, menjalin hubungan dengan pelaku media massa, serta koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan aktivitas komunikasi publik dan membentuk opini sektor transportasi melalui jejaring warganet dan komunitas;
 3. Penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik, edukasi publik, pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik, serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan; dan
 4. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

C. Sasaran Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Sasaran Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada Renstra sebelumnya prinsipnya sejalan dengan sasaran Kementerian Perhubungan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran di level kementerian/lembaga (K/L) dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada level biro yang secara khusus difokuskan pada komunikasi perencanaan dan pembangunan transportasi.

Hasil evaluasi kinerja kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan menunjukkan pesan yang positif dilihat dari tingkat capaian kinerja yang rata-rata 100%. Walaupun kinerja BKIP telah mencapai rata-rata 100% namun belum bisa secara langsung menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, karena levelnya hanya kegiatan. BKIP hanya men-support dari sisi kelembagaan untuk mencapai sasaran Sekretariat Jenderal yaitu Meningkatnya Tata Kelola pemerintah (*Good Government and Good Governance*) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja yaitu Keterbukaan Informasi Publik.

Kebebasan informasi menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, bermartabat, dan *accountable*. Pemerintah berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat

untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan roda pemerintahan melalui aksesibilitas informasi. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi perlu diinformasikan kepada segenap stakeholders baik internal maupun eksternal. Informasi yang memadai akan membantu memberikan pemahaman dalam menyajikan data dan informasi mengenai kebijakan di sektor transportasi. Perlunya komunikasi kepada publik menyebabkan Kementerian Perhubungan perlu terus meningkatkan kegiatan kehumasan agar mampu membentuk reputasi yang baik dan citra positif lembaga. Kegiatan komunikasi publik yang memadai pada akhirnya juga diharapkan mampu mendukung terciptanya dukungan publik terhadap segala bentuk pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan. Program komunikasi yang telah dilaksanakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik bertujuan : Meningkatkan pemahaman publik secara mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan yang menyangkut kebijakan Kementerian Perhubungan; Penanganan transportasi secara menyeluruh dan membangun koordinasi yang baik dengan unit-unit kerja terkait dan stakeholders Kementerian Perhubungan; dan Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.

D. Permasalahan Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Permasalahan yang dihadapi Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mengelola komunikasi publik adalah sebagai berikut :

1. Platform media sosial di satu sisi memberikan banyak peluang untuk mengkomunikasikan agenda pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, platform ini juga menjadi ruang riuh yang memunculkan distorsi informasi dan persebaran informasi negatif atas agenda kebijakan. Akibatnya, isu positif dari kebijakan pemerintah tidak mendapatkan atensi yang cukup dari publik;
2. Pengelolaan komunikasi publik lembaga belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum terstrukturinya pelaksanaan agenda setting kelembagaan yang dikomunikasikan kepada masyarakat dan stakeholder lembaga lainnya;
3. Kurang cepat dalam menangkap isu potensial yang bisa diolah sebagai informasi positif dan mengembangkan agenda setting kelembagaan, baik untuk agenda jangka pendek, jangka menengah, maupun agenda jangka panjang;

4. Peta persepsi publik sebagai tolok ukur kepuasan publik atas kinerja komunikasi publik Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 belum tersusun. Hal ini mengakibatkan evaluasi atas indeks kepuasan publik belum terpantau dan terevaluasi;
5. Relasi kelembagaan yang ditandai dengan adanya data stakeholder dan media mapping belum teridentifikasi dengan jernih. Identifikasi ini diperlukan untuk melakukan segmentasi media dan kebutuhan informasi kelembagaan kepada stakeholder dan masyarakat;
6. Belum adanya data terkait dengan permintaan informasi dan kebutuhan informasi oleh masyarakat terhadap Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan pesan dan konten komunikasi yang akan diproduksi;
7. Program komunikasi yang dijalankan masih bersifat satu arah dan belum interaktif. Sementara itu, program ini juga belum cukup merepresentasikan kebutuhan informasi sebagaimana yang tercantum dalam guideline Kementerian Perhubungan;
8. Belum meratanya kompetensi dan kualitas SDM kehumasan di BKIP, sehingga pelaksanaan berbagai program komunikasi publik masih belum optimal.

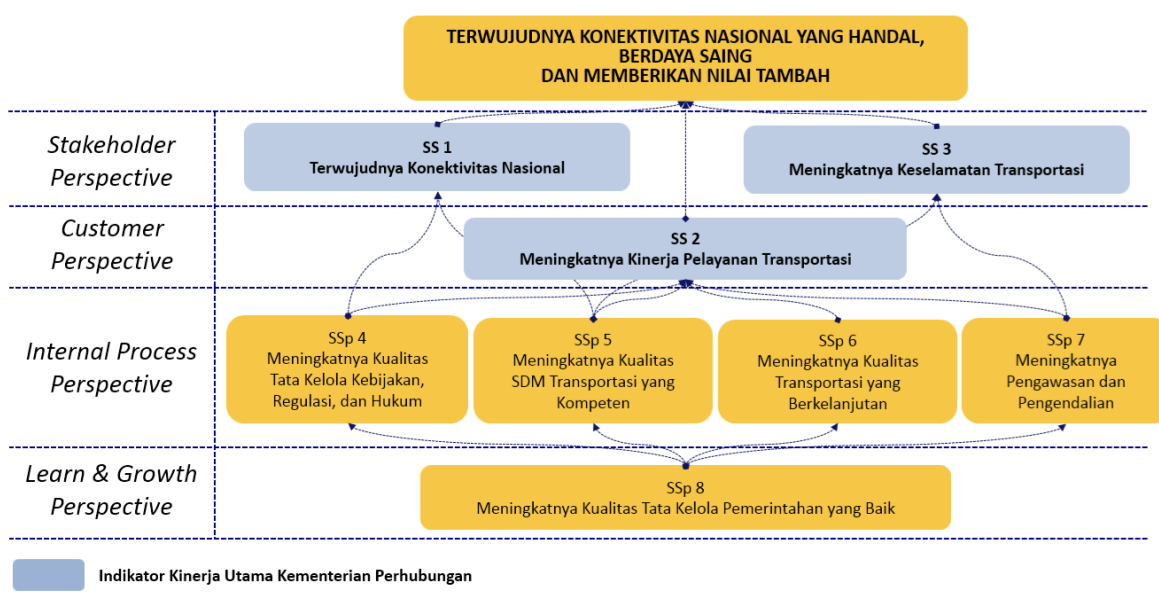
Sementara permasalahan di bidang pelayanan informasi kepada publik, adalah sebagai berikut :

1. Informasi kelembagaan yang menysasar publik internal Kementerian Perhubungan belum tersusun dalam program yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya redundansi aktivitas kelembagaan dan komunikasi internal kelembagaan yang belum terstruktur dengan substansi yang jelas;
2. Kurangnya koordinasi dengan humas subsektor dan stakeholder, sebagai tumpuan komunikasi internal lembaga belum saling mendukung dan terstruktur;
3. Belum terciptanya budaya untuk menempatkan data dan informasi sebagai materi yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan informasi publik terutama terkait pengarsipan dan publikasi kelembagaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan dari sasaran strategis menggunakan pendekatan metode Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective, dapat diuraikan sebagai berikut :



Untuk mewujudkan kondisi sesuai dengan Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, perlu adanya suatu program yang akan melaksanakan proses pencapaian target indikator Sasaran Strategis tersebut.

Sasaran Strategis menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program, sedangkan Sasaran dari suatu Program (Sasaran Program) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang mencerminkan

berfungsinya keluaran. Sasaran Program merupakan turunan yang akan mendukung capaian kinerja dari suatu Sasaran Strategis. Pelaksana yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program adalah unit kerja eselon I.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka unit kerja eselon I diatas Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah Sekretariat Jenderal.

Dari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 sesuai dengan PM 80 Tahun 2020, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan akan melaksanakan Program Dukungan Manajemen Kementerian Perhubungan, yang merupakan program generik dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan 2020-2024, guna mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yakni SSp-4, SSp-6 dan SSp-8.

Terdapat 3 (tiga) sasaran program pada Program Dukungan Manajemen Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sekretariat Jenderal. Dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang tertuang dalam RENSTRA Sekretariat Jenderal, diperlukan sasaran penunjang berupa Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan diampu/dilaksanakan oleh unit kerja eselon 2 (dua) ada berada dibawah kendali Sekretariat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Secara keseluruhan, untuk mendukung capaian target indikator kinerja Sasaran Program Sekretariat Jenderal, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan dan 27 (duapuluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang harus direalisasi dan dicapai target indikatornya oleh 12 (duabelas) unit kerja yang berada dibawah tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Secara lebih lengkap dapat terlihat pada tabel berikut :

No	SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	Dukungan Manajemen Kementerian Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan / Ditetapkan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Biro Hukum
							Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Biro Hukum
2	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Presentase penurunan emisi GRK sektor transportasi		Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Menurunnya Emisi GRK Sektor Transportasi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB)
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Indeks RB Kementerian Perhubungan		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Meningkatnya Birokrasi Kementerian	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan

Pemerintahan yang Baik			Pemerintahan yang Baik		Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan
						Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Biro Umum
						Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Biro Umum
						Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan
						Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan
						Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan
						Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Kementerian Perhubungan	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN

							Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Biro Keuangan
							Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
							Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
							Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	Biro Umum
						Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan Indeks Profesionalisme	Biro Kepegawaian Biro Kepegawaian

							ASN Kementerian Perhubungan	
							Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Kementerian Perhubungan	Biro Kepegawaian
							Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian
							Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Biro Kepegawaian
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB)

						Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik Kementerian Perhubungan	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)
						Meningkatnya kualitas kepemimpinan dalam meningkatkan budaya kinerja	Indeks Kepemimpinan Perubahan Kementerian Perhubungan	Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)
						Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pustikomhub)

						Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
							Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	Mahkamah Pelayaran

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BKIP, serta penunjukkan ketugasan yang dibebankan pada BKIP, maka dari 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan dan 27 (duapuluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan terdapat 6 (enam) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang harus direalisasi oleh BKIP dan didukung pencapaian target indikator kinerjanya. BKIP juga harus menyelaraskan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagaimana yang sudah tertuang dalam sistem Krisna Selaras Kementerian Perhubungan, ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan yang sesuai. Hal ini menindaklanjuti PERMEN BAPPENAS Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Didasarkan pada hal tersebut diatas, maka dari 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang menjadi tanggung jawab BKIP, terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan,

dimana BKIP hanya sebagai unit kerja penunjang capaian kinerja, dan bukan penanggungjawab utama capaian kinerja Sasran Kegiatan tersebut, yakni :

- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum;
- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel;
- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Kementerian Perhubungan

Dengan nomenklatur kegiatan : “Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan”, terdapat 2 Sasaran Kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama BKIP, yakni :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, dengan IKK : Reputasi Positif Kementerian Perhubungan;

2. Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan dalam Meningkatkan Budaya Kinerja, dengan
IKK : Indeks Kepeminpinan Perubahan

Alur Cascading secara detail terkait KRO/RO yang dilakukan oleh BKIP sehingga sampai pada level Sasaran Program bahkan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, sebagaimana tersaji pada Gambar dibawah :

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional (jika ada);
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Capaian lainnya

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.